

Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022

Fella Fandwitania¹, Muhammad Yusra², Poppy Irawan³

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹fellafandwitania@gmail.com*, ²muhammadyusra@soc.unand.ac.id*,
³poppyirawan@soc.unand.ac.id*

Abstract

In 1988, the local government of Indonesia and the government of German federation established paradiplomacy activities in the form of Padang-Hildesheim sister city cooperation. This sister city cooperation has an interesting pattern because the formation of this cooperation not accordance with the provisions for the formation of sister city cooperation, specifically on the basis of similar characteristics and superior regional potential. However, Padang-Hildesheim sister city cooperation has been able to develop for 34 years and it remains active today. The purpose of this study is to identify the causative factors of paradiplomacy development in Padang City and Hildesheim City in 1988 using the concept of paradiplomacy by Alexander S. Kuznetsov. This research is a qualitative descriptive research using primary and secondary data. The results of this study show factors that led the development of Padang-Hildesheim paradiplomacy activities in 1988-2022 from the perspective of Padang City are globalization, democratization, foreign policy domestication, decentralization, problems with the nation-building process, asymmetry of the constituent units, the external stimulus, and the role of regional leaders. Meanwhile, factors that led the development of Padang-Hildesheim paradiplomacy activities in 1988-2022 from the perspective of the Hildesheim City are globalization, foreign policy domestication, federalization, asymmetry of the constituent units, external stimulus, and the role of political parties.

Keywords: Cooperation, Hildesheim, Padang, Paradiplomacy, Sister City.

Pendahuluan

Fenomena globalisasi menjadikan semakin meningkatnya aktivitas diplomasi dalam hubungan internasional. Duchacek menjelaskan bahwa dalam paradiplomasi, pemerintah subnasional memiliki hak yang sama dengan pemerintah nasional dalam melakukan kegiatan luar negeri (Duchacek, 1984). Salah satu bentuk aktivitas paradiplomasi adalah kerja sama *sister city*.

Berdasarkan data dari *Sister Cities International*, pada tahun 2021 negara dengan kerja sama *sister city* terbanyak di dunia adalah Jerman, yaitu dengan

lebih dari 7.000 kerja sama *sister city* yang telah dijalin. Resolusi dari Perdana Menteri Presiden Jerman pada tahun 1962-1988 memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal. Hal tersebut menjadikan negara bagian Jerman banyak melakukan paradiplomasi dengan negara-negara berkembang.

Salah satu negara berkembang yang menjadi mitra paradiplomasi Jerman adalah Indonesia. Pada tahun 1988, Kota Hildesheim-Jerman meresmikan aktivitas paradiplomasi dengan Kota Padang-Indonesia dalam bentuk kerja sama *sister city*. Paradiplomasi ini dilatar belakangi atas banyak perbedaan karakteristik, baik dari kondisi geografis, perekonomian maupun potensi unggulan daerah. Banyaknya perbedaan latar belakang dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim tentunya akan menimbulkan ketimpangan kepentingan. Hal tersebut karena menurut Robert Keohane dan Joseph Nye, kolaborasi antar negara dalam kerja sama ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi atau keunggulan yang sama yang dimiliki masing-masing negara, bukan untuk melengkapi kekurangan atau hal-hal yang tidak dimiliki oleh suatu negara dan diharapkan bisa diperoleh melalui bantuan negara lain. Walaupun demikian, kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dapat berkembang selama 34 tahun dan aktif hingga saat ini. Berkembangnya kerja sama ini dapat dilihat dari perluasan ruang lingkup kerja sama yang pada MoU 1988, kerja sama ini hanya berfokus pada pertukaran mahasiswa dan pelatihan staf, pertukaran informasi, pertukaran budaya, dan perlengkapan yang dibutuhkan, dan pada MoU 2018, ruang lingkup kerja sama ini telah bertambah pada beberapa bidang, meliputi *industry traineeship*, revitalisasi bangunan bersejarah, pengembangan perencanaan kota, manajemen pengurangan resiko bencana, penanganan limbah dan manajemen lingkungan, dan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus

atau tuna netra. Selanjutnya, kerja sama ini berhasil memberikan banyak dampak positif bagi Kota Padang. Dengan adanya paradiplomasi Padang-Hildesheim, pertumbuhan ekonomi Kota Padang dapat meningkat hingga 6% pada tahun 2009-2015 (Yulcherlina, 2018).

Dengan demikian, paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini menarik untuk diteliti karena walaupun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim tidak dilatar belakangi atas kesamaan potensi unggulan daerah tetapi kerja sama ini masih dapat aktif dan berkembang selama 34 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022. Pada penelitian ini, peneliti memilih artikel-artikel jurnal terbaru yang membahas topik yang sejalan dengan pembahasan penelitian penulis, diantaranya tulisan Rika Isnarti dan Sofia Trisni dengan judul “*The City of Padang Challenges for Paradiplomacy.*” Tulisan ini menjelaskan mengenai paradiplomasi yang telah dilakukan Kota Padang yang diawali dengan kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim pada tahun 1988 dan dilanjutkan dengan kerjasama dengan Ba Ria Vung Tau, Vietnam dan Fremantle, Australia. Namun dalam menjalankan paradiplomasi, Padang dinilai sangat lambat karena terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Padang seperti keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengurus kerja sama luar negeri, kurangnya kerja sama dengan pihak lokal dalam menjalankan kerja sama luar negeri, dan lainnya. Kota Padang juga dinilai menutup diri dari dunia global karena beberapa permasalahan seperti birokrasi, pola pikir dan kemauan politik. Walaupun minimnya implementasi paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang, tetapi hingga saat ini Pemerintah Kota Padang masih berusaha dalam memaksimalkan paradiplomasi dan mengimplementasikan program-program dalam kerja sama luar negeri (Isnarti dan Trisni, 2020). Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian ini adalah “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022.”

Metode

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode kualitatif dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022. Luaran dari penelitian kualitatif ini adalah tulisan deskriptif-analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Unit analisis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022. Unit eksplanasi dalam penelitian ini yakni kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim. Penelitian ini memakai pengumpulan arsip, wawancara, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yang dapat menunjang data-data terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022. Dari berbagai sumber tersebut memberikan sudut pandang yang berbeda-beda bagi peneliti sehingga dapat menjadi sebuah landasan dalam pengambilan suatu kesimpulan.

Tinjauan Pustaka

Kuznetsov dalam bukunya “*Theory and Practice of Paradiplomacy; Subnational Governments in International Affairs*”, menjelaskan bahwa secara garis besar, dalam menjelaskan penyebab berkembangnya suatu aktivitas paradiplomasi, dapat diidentifikasi berdasarkan 2 faktor, yaitu berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal (Kuznetsov, 2015).

Faktor eksternal yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi adalah sebagai berikut (Kuznetsov, 2015).

1. Globalisasi. Globalisasi menjadikan semakin mudarnya batas-batas ekonomi dan budaya antar negara sehingga memberikan kesempatan bagi entitas subnasional untuk mengejar kepentingan ekonomi mereka melalui lintas batas negara.
2. Regionalisasi. Dalam melakukan paradiplomasi, pemerintah subnasional dapat melakukan evaluasi dampak dari regionalisasi terlebih dahulu dan

kemudian menjadikan pengelompokkan dalam regionalisasi sebagai landasan dalam melakukan paradiplomasi.

3. Demokratisasi. Paradiplomasi berkaitan erat dengan penguatan demokrasi.
4. Domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri. Adanya ketidakjelasan antara batas-batas politik dalam negeri dan luar negeri mendorong pemerintah subnasional untuk melakukan paradiplomasi dengan tujuan menyelesaikan *low political issue*.

Sedangkan faktor internal yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi adalah sebagai berikut (Kuznetsov, 2015).

1. Federalisasi dan desentralisasi. Adanya pemberian otoritas terhadap pemerintah negara bagian (federalisasi) atau pemerintah daerah (desentralisasi) dari pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan di arena internasional menjadikan meningkatnya paradiplomasi di hubungan internasional.
2. Masalah dengan proses pembangunan bangsa. Paradiplomasi memberikan peluang yang besar bagi pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional dengan bantuan pemerintah non pusat.
3. Kurang efektifnya pemerintah pusat di hubungan luar negeri. Lemahnya pemerintah pusat dalam mengelola politik luar negeri secara efektif mendorong pemerintah non pusat untuk melakukan paradiplomasi.
4. Asimetri unit penyusun. Adanya kekuatan besar ekonomi dan potensi unggulan subnasional tidak selalu harus dibatasi oleh batas-batas negara sehingga pemerintah subnasional harus menyebarkan potensi yang besar tersebut ke arena internasional.
5. Stimulus luar. Adanya stimulus eksternal dapat memberikan peluang besar bagi daerah atau negara bagian dalam mencapai kepentingan yang

lebih besar dari kepentingan nasional dengan melawati batas-batas nasional.

6. Peran pemimpin daerah atau partai politik. Kepribadian pemimpin daerah dan identitas ideologi partai politik tertentu dapat menentukan intensitas dan kepentingan yang akan dicapai dalam paradiplomasi.
7. Peran perbatasan. Kondisi geografis yang berdekatan menjadikan negara-negara memilih untuk melakukan paradiplomasi dengan tujuan saling mencapai kepentingan satu sama lain.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep paradiplomasi karena dianggap tepat dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi dalam bentuk kerja sama *sister city* karena *sister city* merupakan salah satu aktivitas paradiplomasi.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022 dari Perspektif Kota Padang

Faktor eksternal Kota Padang yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Globalisasi.

Melalui perkembangan globalisasi, timbul kesepakatan agenda 2030 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dunia (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan yang harus dicapai oleh seluruh negara di dunia. Dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini, Pemerintah Kota Padang yang berperan sebagai pemerintah subnasional Indonesia ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs. Terdapat 2 program yang dibentuk dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini yang sejalan dengan SDGs. Program pertama adalah *wash management of Batang Arau River*. Sasaran dari program ini bertujuan untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs yaitu menjamin ketersediaan dan

pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Melalui perkembangan globalisasi, Pemerintah Kota Padang dapat menemukan mitra kerja sama yang dapat memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan kualitas air DAS Batang Arau Padang tersebut. Program kedua adalah bantuan dari Yayasan Hildesheim yang bernama *Hildesheimer Blinden Mission* yang fokus dalam membantu anak berkebutuhan khusus akan membantu pelajar tuna netra di Kota Padang dalam bentuk pelatihan tenaga guru/dosen, bantuan alat praga, dan buku-buku mata pelajaran yang menggunakan huruf *braile* (Yulcherlina, 2018). Bantuan tersebut merupakan implementasi Upaya Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Hildesheim dalam mencapai target 4.5 tujuan nomor 4 SDGs.

2. Demokratisasi.

Adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan demokratisasi di Indonesia. Melalui proses demokratisasi tersebut, muncul hukum yang mengatur secara jelas mengenai wewenang pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan luar negeri. Dengan adanya penjelasan bidang-bidang kerja sama yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk dilakukan pemerintah daerah dalam paradiplomasi seperti yang diatur dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memperluas fokus kerja samanya dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat.

3. Domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri.

Paradiplomasi Padang-Hildesheim ini merupakan bentuk akselerasi atau percepatan dalam mencapai pembangunan nasional di Indonesia, terutama pada bidang lingkungan dan Pendidikan (Erwin, 2023). Pemerintah Kota Padang sebagai pemerintah daerah di Indonesia membantu pemerintah pusat untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs dalam meningkatkan kualitas air di Indonesia melalui pembentukan program-program seperti perencanaan teknis dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin Padang, kerja sama

pengelolaan air minum PDAM, dan program *Wash Management of Batang Arau River* dengan Pemerintah Kota Hildesheim. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga berupaya untuk mencapai tujuan nomor 4 SDGs dengan membentuk berbagai program kerja sama dengan Pemerintah Kota Hildesheim seperti *Engineering for Indonesia*, bantuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan tuna netra di Kota Padang.

Faktor internal Kota Padang yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Desentralisasi.

Dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat Indonesia telah mengatur dengan jelas bidang-bidang hubungan luar negeri yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Adanya wewenang tersebut mendorong Pemerintah Kota Padang untuk memanfaatkan wewenang tersebut dengan mempertahankan paradiplomasi dengan Kota Hildesheim, Jerman. Paradiplomasi yang dijalin oleh Padang-Hildesheim ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan desentralisasi atau pemberian otoritas kepada pemerintah daerah di Indonesia dalam hubungan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim selama 34 tahun yang tidak melanggar batasan-batasan bidang kerja sama luar negeri yang dilarang oleh pemerintah pusat Indonesia untuk dilakukan oleh pemerintah daerah, dimana program-program dalam kerja sama *sister city* kedua kota ini meliputi bidang pendidikan, olahraga, kesenian dan budaya, pertanian, lingkungan, bantuan kemanusiaan, dan pertukaran informasi.

2. Masalah dengan proses pembangunan bangsa.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih berorientasi dengan pemanfaatan SDA dan lingkungan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi (Frinaldi, 2022). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki banyak masalah dengan proses pembangunan bangsa dalam hal pengelolaan lingkungan dan sumber daya air.

Studi pembuangan sampah yang dicatat oleh *World Bank* pada tahun 2021 menjelaskan bahwa catatan sampah dari 500 kota dan 34 provinsi di Indonesia menghasilkan 7,8 ton sampah setiap tahunnya, dengan 4,9 juta ton sampah plastik tidak dikelola dengan baik sehingga mengalir ke berbagai saluran drainase dan berujung pada Daerah Aliran Sungai (DAS) (Renaldi dan Frinaldi, 2022). Salah satu DAS di Indonesia yang telah tercemar adalah DAS Batang Arau yang berada di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang mengambil peran dalam membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia ini dengan cara memperbaiki kualitas air di DAS Batang Arau, Padang. Kepentingan Pemerintah Kota Padang tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kota Hildesheim dimana kedua kota menyepakati pemberian bantuan dalam program *wash management of Batang Arau River*. Bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim dalam program *wash management of Batang Arau River* ini merupakan bentuk implementasi kepatuhan Pemerintah Hildesheim terhadap politik luar negeri Jerman pada program *Engagement Global*. Dalam program tersebut dijelaskan bahwa pemerintah federal Jerman akan memberikan bantuan pembangunan bagi mitra kerja sama kotanya untuk menyelesaikan permasalahan global. Salah satu bentuk bantuan yang akan diberikan pemerintah federal Jerman adalah dengan memfasilitasi tenaga ahli.

3. Asimetri unit penyusun.

Dalam paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim, yang menjadi faktor asimetri unit penyusun sehingga dapat menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim selama 34 tahun adalah adalah potensi unggulan kebudayaan yang dimiliki Kota Padang. Pemerintah Kota Padang berhasil memperkenalkan kebudayaan Minang seperti tarian adat dan kuliner Minangkabau di kalangan masyarakat Hildesheim dan masyarakat internasional.

4. Stimulus luar.

Adanya dukungan kuat dari mantan pemimpin daerah Kota Padang mendorong perkembangan kerja sama ini. Bapak Syahrul Ujud, Walikota Padang

yang menjabat pada tahun awal pembentukan paradiplomasi Padang-Hildesheim ini masih sering ikut terlibat dalam kegiatan paradiplomasi ini walaupun sudah tidak menjabat sebagai Walikota Padang. Selain itu, adanya dukungan dari *stakeholder* lain seperti pihak Universitas Bung Hatta juga mendorong berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim ini (Erwin, 2023).

5. Peran pemimpin daerah.

Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang menjelaskan bahwa berkembangnya kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah Kota Padang dalam menindak lanjuti kerjasama-kerjasama yang telah disepakati terdahulu. Bentuk implementasi komitmen pemerintah daerah Kota Padang ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh pemimpin daerah di Kota Padang ke Hildesheim seperti kunjungan Wakil Walikota Padang, Mahyeldi ke Hildesheim pada tanggal 10 Februari 2012, dan lainnya. Selain itu, bentuk implementasi komitmen pemimpin daerah juga dapat dilihat aktifnya pemimpin daerah di Kota Padang dalam menghadiri acara-acara penting seperti peringatan 25 tahun kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim dan promosi terpadu Indonesia dalam *Information Evening sister city* Padang-Hildesheim (Erwin, 2023).

Faktor-faktor Penyebab Berkembangnya Aktivitas Paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim Pada Tahun 1988-2022 dari Perspektif Kota Hildesheim

Faktor eksternal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Globalisasi.

Adanya kewajiban negara-negara untuk mencapai SDGs menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keberlangsungan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim ini. Dalam kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini, Pemerintah Kota Hildesheim yang berperan sebagai pemerintah subnasional Jerman ikut mengambil peran untuk mencapai SDGs melalui program bantuan

kepada Kota Padang. Dalam program *wash management of Batang Arau River* yang bertujuan untuk mencapai tujuan nomor 6 SDGs, pemerintah federal Jerman melalui Pemerintah Kota Hildesheim mengirimkan tenaga ahli hidrologi ke Kota Padang untuk membantu menemukan solusi atas permasalahan kualitas air sungai di DAS Batang Arau tersebut. Pemerintah Kota Hildesheim mengambil peran dalam pencapaian tujuan nomor 6 SDGs tersebut karena Kota Hildesheim merupakan kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang sangat maju dan sudah mulai dikelola pada tahun 1994 (Rohman, 2023). Selain itu, untuk mencapai tujuan nomor 4 SDGs di Kota Padang, Pemerintah Kota Hildesheim juga memberikan bantuan melalui Yayasan Hildesheim yang bernama *Hildesheimer Blinden Mission* yang fokus dalam membantu anak berkebutuhan khusus akan membantu pelajar tuna netra di Kota Padang.

2. Domestikasi kebijakan luar negeri dan internalisasi politik dalam negeri.

Dalam Resolusi Perdana Menteri Jerman tahun 1962-1988 dijelaskan dijelaskan bahwa langkah-langkah bantuan pembangunan di luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang dan hal-hal tersebut harus dilakukan dalam koordinasi yang erat dengan pemerintah federal (Knodt, 2023). Adanya kebijakan luar negeri Jerman tersebut mendorong Pemerintah Kota Hildesheim ikut mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memberikan bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap Kota Padang.

Sedangkan faktor internal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah sebagai berikut.

1. Federalisasi.

Dalam konstitusi dasar Jerman, pemerintah pusat Jerman telah menjelaskan terkait wewenang pemerintah negara bagian untuk dapat terlibat dalam kerja sama luar negeri seperti kerja sama *sister city* secara jelas yaitu dalam

Pasal 32 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman (DGAP MEMO, 2021). Dalam Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman dijelaskan bahwa pemerintah negara bagian Jerman ikut bertanggung jawab dalam menjaga hubungan luar negeri. Adanya dukungan penuh dari pemerintah federal Jerman dalam kerja sama luar negeri tersebut menjadikan paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim dalam bentuk kerja sama *sister city* ini dapat aktif dan berlangsung selama 34 tahun. Kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim ini juga sesuai dengan bidang-bidang yang diatur dalam kompetensi negara federal dimana kerja sama ini mencakup bidang pendidikan dan budaya.

2. Asimetri unit penyusun.

Potensi unggulan budaya yang dimiliki Kota Hildesheim sebagai kota warisan budaya yang diakui UNESCO dengan wisata bangunan bersejarahnya menjadi faktor penyebab berkembangnya paradiplomasi Padang-Hildesheim. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Hildesheim dalam memaksimalkan potensi tersebut adalah dengan tetap mempertahankan paradiplomasi dengan Pemerintah Kota Padang, Indonesia yang juga memiliki kesamaan potensi unggulan budaya di wisata bangunan bersejarahnya. Selain itu, paradiplomasi Padang-Hildesheim ini juga terbentuk karena potensi unggulan Kota Hildesheim yang maju dalam bidang teknologi dan industri sehingga menjadikan Pemerintah Kota Padang tertarik untuk mempertahankan kerja sama *sister city* dengan Kota Hildesheim. Pemerintah Kota Hildesheim memanfaatkan potensi unggulannya tersebut dalam pertukaran informasi dan pemberian bantuan ke Kota Padang (Erwin, 2023).

3. Stimulus luar.

Oliver Rösner, penanggung jawab kerja sama internasional Kota Hildesheim menjelaskan bahwa faktor utama pendorong dan penggerak kerja sama ini diluar administrasi kedua kota adalah kontak pribadi antara Mimi dan Roland Schlüter. Dalam paradiplomasi Padang-Hildesheim ini, Roland dan Mimi mengambil peran dalam menghubungkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam kerja sama ini dan menginformasikan program-program dalam kerja sama

ini. Selain itu, adanya SDGs juga mendorong pemerintah negara maju di dunia untuk bertanggung jawab dalam membantu negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Jerman sebagai negara maju ikut mengambil peran dalam memberikan bantuan pembangunan dengan membentuk *Engagement Global* sebagai bentuk implementasi tujuan nomor 17 SDGs yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan (Rohman, 2023). Dalam *Engagement Global* ini dijelaskan bahwa Jerman berkomitmen untuk memperkuat dan memfasilitasi mitra kerja sama kotanya dan negara-negara *global south* untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

4. Peran partai politik.

Perdana Menteri Jerman dari tahun 1962-1988 membuat resolusi yang memperjelas bahwa pelaksanaan langkah-langkah bantuan pembangunan luar negeri merupakan urusan pemerintah federal, dan pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas pemberian bantuan pembangunan dan bantuan di bidang pendidikan terhadap negara lain terutama negara-negara berkembang. Menanggapi peraturan tersebut, Pemerintah Kota Hildesheim dibawah pengawasan Pemerintah Negara Bagian Lower Saxony, Jerman ikut mengambil peran dalam bantuan pembangunan luar negeri di bidang pendidikan dimana hal ini dibuktikan dari fokus utama kerja sama *sister city* Padang-Hildesheim adalah bidang pendidikan. Bentuk bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Hildesheim dalam kerja sama ini adalah pengiriman tenaga ahli ke Kota Padang dan membuat program *Engineering for Indonesia* (EFI) bagi pelajar Kota Padang yang didanai oleh Hildesheim. Selain itu, Pemerintah Kota Hildesheim juga membukakan jalan bagi para pelajar Kota Padang untuk menuntut ilmu di *HAWK University Hildesheim* (Yulcherlina, 2018).

Kesimpulan

Berkembangnya aktivitas paradiplomasi Padang-Hildesheim selama 34 tahun tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat diidentifikasi berdasarkan konsep paradiplomasi oleh Alexander S. Kuznetsov. Dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi

Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022, penulis mengkategorikan penjelasan dari dua perspektif, yaitu faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 dari perspektif Kota Padang dan perspektif Kota Hildesheim. Selanjutnya, penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 dari perspektif Kota Padang tersebut juga dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 dari perspektif Kota Padang yang penulis temukan terdiri dari faktor globalisasi, demokratisasi, dan domestikasi kebijakan luar negeri. Selanjutnya faktor internal Kota Padang yang ditemukan sebagai penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah faktor desentralisasi, masalah dengan proses pembangunan bangsa, asimetri unit penyusun, stimulus luar, dan peran pemimpin daerah.

Selanjutnya, dari perspektif Kota Hildesheim, faktor eksternal penyebab berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah globalisasi dan domestikasi kebijakan luar negeri. Sedangkan faktor internal Kota Hildesheim yang menyebabkan berkembangnya aktivitas paradiplomasi Kota Padang dan Kota Hildesheim pada tahun 1988-2022 adalah federalisasi, asimetri unit penyusun, stimulus luar, dan peran partai politik.

Daftar Pustaka

Book

Kuznetsov, Alexander S. 2015. *Theory and Practice of Paradiplomacy; Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.

Yulcherlina., et al. 2018. *30 Tahun Kerjasama Sister City Padang – Hildesheim*. Padang: Sekretariat Daerah Kota Padang.

Journal article

Duchacek. 1984. "The International Dimension of Subnational Self Government." *Publius* 14, no.4. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pubjof.a037513>

Isnarti, Rika dan Sofia Trisni. 2020. "The City of Padang Challenges for Paradiplomacy." *AEGIS: Journal of International Relations* 4, no.2. <http://dx.doi.org/10.33021/aegis.v4i2.1247>

Leffel, Benjamin dan Sohaela Amiri. 2018. "Sino-U.S. Sister City Relations: Subnational Networks and Paradiplomacy." *Rising Power Quarterly* 3, no.1. <https://rpquarterly.kureselcalismalar.com/issue/public-diplomacy-of-rising-and-regional-powers/>

Renaldi, Irvan dan Aldri Frinaldi. 2022. "Implementation of Batang Arau Watershed Management with Good Environmental Governance Perspective." *Jurnal Bina Praja* 14, no.2. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.225-237>

Newspaper article

Frinaldi, A., et al. 2022. "Good Environmental Governance Model in Domestic Waste Management in Batang Arau, West Sumatera." IOP Publishing. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1098/1/012002/meta>

Government publication

Administrative Arrangement Between The Municipal Government of Padang, West Sumatera, Indonesia and The Municipal Government of Hildesheim, Lower Saxony, Federal Republic of Germany, "Concerning City Cooperation," 1988.

Declaration of Interest by Municipal Partnerships Wishing to Participate in the Program: experts for Municipal Partnerships Worldwide. 2019.

Minutes of Meeting Between The Vice Mayor of The City of Padang and The Mayor of The City of Hildesheim On The Implementation of Sister City Cooperation Between Padang and Hildesheim. 2015.

Interview Reports

M, Erwin. Wawancara oleh penulis. Padang, 19 Juni 2023.

Rohmann, Michell. Wawancara oleh penulis. Email, 25 Juli 2023.

Rösner, Oliver. Wawancara oleh penulis. Email, 11 Juli 2023.